

bentuk yang tepat. Pada dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan administrasi negara yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan administrasi yang makin handal, professional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan.

Salah satu gejala yang tampak dalam proses pergeseran ini adalah makin meningkatnya perhatian aspek budaya dalam studi organisasi. Tidak hanya sebagai salah satu bagian penting dalam studi organisasi, tetapi konsep budaya dipergunakan sebagai metafora untuk menjelaskan perwujudan dan hakekat organisasi. Penggunaannya dalam analisis organisasi, budaya tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang ada dan hidup dalam suatu organisasi, tetapi juga sesuatu yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dalam pemahaman organisasi. Sebagai suatu variabel dalam organisasi, budaya dipelajari sebagai bagian dari sistem organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, budaya dilihat sebagai sesuatu yang hidup di suatu organisasi yang mengikat semua anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya juga dapat dilihat

sebagai bagian dari suatu lingkungan organisasi yang mempengaruhi perilaku dan penampilan (*performance*) organisasi. Analisis terhadap kinerja birokrasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis.

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekrutan suatu jabatan yang didasarkan pada pertimbangan *like and dislike* pimpinan serta masih melekatnya budaya paternalisme. Secara mental

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), jugamenyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentangseberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkandengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulanbahwa kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalamkegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakasebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telahditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu

tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Yeremias T. Keban (2004 : 203) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut :

Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.

Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.

Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen

klasik, maka penilaian selalu biasa kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.

Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar. Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005 : 180), kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut :

Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.

Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi

penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Selanjutnya Yuwono dkk.dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi kinerja organisasi tersebut.

Kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi.

Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.

Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeparto, dalam Hessel Nogi (2005 : 181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Faktor eksternal, yang terdiri dari :

Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.

Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.

Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor internal, yang terdiri dari :

Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.

Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.

Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan.

Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara garis besarnya, faktor yang sangat dominan mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor internal (faktor yang datang dari dalam organisasi) dan faktor eksternal (faktor yang datang dari luar organisasi). Setiap organisasi akan mempunyai tingkat kinerja yang berbeda-beda karena pada

hakekatnya setiap organisasi memiliki ciri atau karakteristik masing-masing sehingga permasalahan yang dihadapi juga cenderung berbeda tergantung pada faktor internal dan eksternal organisasi.

PENILAIAN KINERJA

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi (2005 : 174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*missionaccomplishment*) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (2001 : 330) dalam Hessel Nogi (2005 : 173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci, Bastian mengemukakan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut :

Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.

Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan

perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya.

Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati.

Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.

Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Membantu proses kegiatan organisasi.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

Mengungkapkan permasalahan yang terjadi, Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator-indikator pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu.

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan

direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri. Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan

karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, yang oleh Anwar (2005 :37), kebijakan pertanian dan pedesaan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar dan biaya-biaya transaksi.

Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah pedesaan yang di dominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam menyeimbangkan pembangunan yang berdampak pada pembangunan infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Untuk itu Wresniwiro (2007:45), mengemukakan suatu konsep pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan

menyeimbangkan pembangunan-kota yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan: (1)pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan.

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan pada ruang kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan. Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan

harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan dapat segera terwujud.

Sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian, dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang dan pangan. Dimana sebagian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung megah. Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non fisik. (Wresniwiro, 2007:58).

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady (2001:54-73), bahwa dalam pengumpulan data terdiri dari, "Observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Melihat hal itu sehingga peneliti menggunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa cara anantara lain:

1. Observasi yaitu, untuk melihat secara langsung dan mencari informasi yang ada kaitanya dengan penelitian.
2. Wawancara yaitu, untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui proses komunikasi dua arah.
3. Angket yaitu , daftar pertanyaan dari peneliti kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Dokumentasi yaitu, bentuk dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan didalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang lebih baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpulan data yang baik dan lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan handal (*reliabel*). Dan untuk itu dapat menyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang di gunakan itu valid dan handal, maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus di uji secara kualitatif dan menghasilkan data yang obyektif.

Teknik Analisis Data

Data Yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kulitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan

berupa Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, serta faktor-faktor penghambat Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Pembahasan

Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

Kinerja Kepala Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam dan merupakan yang menjadi indikator penelitian ini antara lain: Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Pembangunan infrastruktur desa indikatornya, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembagunan, adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan dan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan.

Adapun cara penyusunan program, dengan mengikuti beberapa langkah

berperan dalam meningkatkan perlindungan, kepedulian, toleransi dan partisipasi masyarakat dalam segala situasi dan kondisi.

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Kepala Desa Sidorukun dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) dan/atau [Tentara Nasional Indonesia](#) mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah [kecamatan](#);
- Melakukan koordinasi dengan pemuka [agama](#) yang berada di wilayah kerja [kecamatan](#) untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah [kecamatan](#); dan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada [bupati/walikota](#).

Tujuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan harapan yang dikehendaki dari setiap pemerintah daerah, keadaan

masyarakat yang tentram dan kondusif. semua ini merupakan pengharapan dimana pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dapat melaksanakan segala kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini di definisikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, keadaan yang dimana tuntutan, larangan, pemaksaan yang diberikan kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut tentulah adanya keselarasan antara pengenalan terhadap apa dan mau kemana atau juga dapat dikatakan tepat sasaran.

Usaha dari pemerintah daerah dalam mewujudkan keadaan tentram dan ketertiban umum dapat dibagi dalam tahap perencanaan awal yang matang, pelaksanaan yang berkesinambungan sampai pada pengukuran atau yang menentukan arah kebijakan selanjutnya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparat yang berada di Kantor Desa Sidorukun mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup optimal dengan mengadakan pos kambling di

setiap dusun dan aparat pengamanan (hansip)” (Wawancara 17 november 2014).

Namun berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh salah seorang warga bernama Ali Najib Tantu mengatakan : “Kami masih merasa kurang nyaman dan aman karena aparat pengamanan tidak berjaga selama 24 jam, tetapi di satu sisi kami merasa tentram karena masyarakat yang ada didusun kami hidup dengan harmonis, damai dan saling menghormati, menjaga satu dengan yang lain”. (Wawancara 19 november 2014).

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Sidorukun dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau [Kepolisian Negara Republik Indonesia](#); dan

- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah [kecamatan](#) kepada [bupati/walikota](#).

Kepala Desa Sidorukun berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa, " Kepala Desa Sidorukun atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja [desa](#) yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari [Bupati/Walikota](#) untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan".

Bedasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang aparat yang ada mengatakan bahwa : “ Upaya dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan dengan maksimal, salah satu contoh yang kami lakukan ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga penempelan poster- poster menyangkut peraturan - peraturan daerah ”.

Pembangunan infrastruktur desa.

Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan

dan daya tarik tersendiri Kemiskinan dan ketidak mampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Adapun indikator dari pembangunan infrastruktur desa adalah sebagai berikut:

Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai

target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.

Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi.
- c. Partisipasi dalam perencanaan.
- d. Partisipasi dalam melaksanakan operasional.
- e. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat desa Sidorukun kecamatan Randangan dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak Hasbi yakni seorang warga desa Sidorukun kecamatan Randangan yang mengatakan bahwa : “Tidak semua program pembangunan yang ada bisa

Desa Sidorukun berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan pembangunan tahun ini. Proses perencanaan pembangunan diselenggarakan selama sehari dari jam 08.00 sampai jam 16.30. Berikut petikan pernyataannya:

"Saya usahakan untuk proses perencanaan pembangunan kali ini sedapat mungkin bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun karena kesibukan dan keterbatasan ruang maka tidak seluruhnya saya undang, toh aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan RT/RW, saya yakin mereka memaklumi." (Wawancara 11 November 2014).

Sedangkan proses perencanaan pembangunan di Desa Sidorukun berlangsung selama 2 jam 38 menit yakni dari jam 13.52 sampai dengan jam 16.30, pada tanggal 23 november 2014 yang dihadiri oleh 31 Orang peserta terdiri dari para ketua RW, Ketua LPM, Ketua Palmas (Pelayanan Kesehatan Masyarakat), dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, terdiri dari kegiatan rembug warga tingkat dusun yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan yang disampaikan kepada Desa,

penetapan tim penyelenggara musrenbang Kelurahan yang bertugas menyusun jadwal, agenda, mengundang calon peserta dan menyiapkan peralatan, bahan dan materi.

2. Tahap pelaksanaan, terdiri dari:
 - a. Pembukaan acara oleh Sekretaris Desa Sidorukun.
 - b. Pemaparan kepala Desa Sidorukun, tentang deadline penyelenggaraan musrenbang kelurahan.
 - c. Pemaparan Kasi Pemerintahan, tentang hasil musrenbang dusun/rembug tingkat dusun.

3. Keluaran

Menetapkan 4 Orang delegasi untuk mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan. Berdasarkan mekanisme di atas, belum ada agenda pembahasan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing dusun untuk ditetapkan menjadi daftar prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke Kecamatan. Begitu pun dengan Desa Sidorukun proses perencanaan pembangunan tidak mengagendakan penetapan daftar kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan, sehingga daftar tersebut dibuat oleh pihak desa tanpa melibatkan peserta yang hadir dalam musrenbang.

menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban pemerintah desa dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan merata.

Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil bagian dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan pemerintah Desa. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program pembangunan di desa sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang/anggota masyarakat tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah dikategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam partisipasi Non Fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah sebagai ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan uraian Camat Randangan, mengemukakan bahwa:

"Pembangunan yang dilihat pada kemampuan masyarakat desa untuk

berkembang telah dapat ditingkatkan di desa Sidorukun kecamatan Randangan sebagian besar adalah hasil musrembang yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat kecamatan Randangan, jadi mereka 'masyarakat' memang sudah berpartisipasi" (wawancara tanggal 15 November 2014)

Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat diwujudkan pada berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan/rapat, melalui surat/saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan.

Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat

disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Sidorukun dalam pembangunan dengan bentuk Ide/Pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberikan pendapat dan saran dalam pertemuan.

Kemampuan masyarakat desa sidorukun untuk berkembang telah dapat ditingkatkan di lihat pula pada menentukan gagal tidaknya suatu program atau proyek. Pada tahap pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa jenis kegiatan yang memungkinkan masyarakat dapat ikut terlibat dan ambil bagian terutama menyangkut pelaksanaan pekerjaan karena pada bagian ini masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut terlibat memberikan dukungan, motivasi atau semangat, mengorbankan tenaga, waktu dan material. Untuk mengkaji berapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu mengidentifikasi jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan sebagai indikator pengukuran tingkat partisipasi terdiri dari: (1) upaya yaitu dorongan atau semangat yang terkandung dalam diri masyarakat untuk mendukung program

atau memiliki sifat ajakan kepada masyarakat lain, tumbuh rasa memiliki; (2) kemauan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam setiap jenis kegiatan baik dalam proses sosialisasi maupun proses pelaksanaan kegiatan; (3) kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi sumber daya baik tenaga, waktu, material, uang serta kehadiran dan keaktifan masyarakat untuk menerima informasi. Untuk menggali data tentang seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sidorukun maka aspek tersebut.

Faktor- faktor penghambat Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa Sidorukun merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan

nasional diletakkan pada pembangunan kecamatan.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah kecamatan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat kecamatanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, menurut hemat penulis faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa Sidorukun Kecamatan Randangana adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

Faktor Intern yang meliputi :

Faktor Kesadaran / Kemauan Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi

cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan yang merupakan lokasi penelitian ini.

Alasan informan memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yakni menggambarkan bahwa:

“Alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi terkadang terkendala karena ada yang kerja sebagai buruh...” (wawancara tanggal 27 November 2014)

Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran masyarakat di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Faktor Ekstern yang meliputi :
Kepemimpinan Pemerintah

Faktor Ekstern yakni Kepemimpinan Pemerintah.

Hal ini dapat disimpulkan melalui hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian teori yang dikemukakan oleh Taliduzuhu Ndraha (1991:23) yang diukur melalui indikator Independen dan Dependen menunjukkan bahwa dalam mengukur kinerja maupun keberhasilan Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan dapat dilihat dari kedua faktor tersebut di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di desa sidorukun kecamatan randangan kabupaten pohuwato dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, terlihat pada mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan masih

kurang atau tidak jalan, begitu pula pada pembangunan infrastruktur desa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembagunan, Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan dan Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan hal ini tidak jalan.

2. Faktor penghambat kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato masih dipengaruhi faktor intern seperti faktor kesadaran atau kemauan dan faktor ekstern yakni kepemimpinan pemerintah itu sendiri.

Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Sidorukun dan pembentukan perda yang mengatur tentang koordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Perlu adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, agar masyarakat turut bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kemampuan masyarakat desa untuk lebih ditingkatkan serta kesadaran dan kemauan memiliki jiwa kepemimpinan yang adaptif.

Daftar Pustaka

Arikunto Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineke Cipta.

Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta.

Hamdi Muchlis, 2002. *Bungan Rampai Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Handoko H, 2000. *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BFFEYogyakarta.

Harbani Pasolong, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

Hendra, J.P., 2002, *Organisasi Publik, (Kasus di Dinas Lingkungan Hidup*

KabupatenPurwakarta) , Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana MAPUGM.

Henry. S, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeong (1999). *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineke Cipta

Irawan, P.1997. *Analisis Kinerja: Panduan Praktis Untuk Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses dan Kinerja Pegawai*, LAN RI, Jakarta.

Nasution, S, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Nasution, S, 2002. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Osborne, David & Ted Gaebler. 1996. *Reinventing Government : How The Enterpreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, The Adidson Wesley Publishing Company Inc.